

STRATEGI HEDGING DALAM MENDUKUNG DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA (STUDI KASUS: ALIH TEKNOLOGI RUDAL C-705)

HEDGING STRATEGY TO SUPPORT INDONESIAN DEFENSE DIPLOMACY (CASE STUDY: TRANSFER OF MISSILE TECHNOLOGY C-705)

Erni Ambarwati¹, Jonni Mahroza², Supandi³

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan

(erni.ambarwati@idu.ac.id)

Abstrak -- Dalam upaya modernisasi kekuatan militer, Pemerintah melalui kebijakan *Minimum Essential Force* merumuskan rangkaian kegiatan yang tepat guna dan memiliki nilai strategis untuk jangka panjang yang tersusun dalam rencana strategis. Salah satu diantaranya pengembangan dan produksi bersama rudal C-705. Pengembangan dan produksi bersama rudal C-705 merupakan salah satu dari tujuh alutsista strategis rumusan KKIP yang dinilai memiliki peran signifikan dalam proyeksi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan impor alutsista dan sanksi embargo. Hal demikian mendorong pemerintah mengeluarkan UU. No. 16/2012 Tentang Industri Pertahanan yang mana menyertakan IDKLO (Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Offset) dalam pengadaan alutsista guna memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan membangun industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Permasalahan yang ingin diteliti yakni diplomasi pertahanan Indonesia dalam proses upaya alih teknologi rudal C-705 dan dampak diplomasi pertahanan Indonesia terhadap kerja sama dalam upaya alih teknologi rudal C-705. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui *snowball sampling* dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia dalam proses alih teknologi rudal C-705 merupakan instrumen pendukung strategi *hedging* agar tidak terjebak dalam permainan politik ekonomi China yang berakibat merugikan akibat salah memilih dan berjuang lebih prinsipil dalam peran strategisnya melalui kebijakan MEF dengan tiga pendekatan yakni *engagement*, *soft balancing*, dan *enmeshing*. Lebih lanjut, kerja sama industri pertahanan dalam upaya alih teknologi rudal C-75 berdampak terhadap *bargaining power* Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan untuk meningkatkan *Confidence Building Measures*, *Capacity Building*, dan membantu industri pertahanan dalam kemandirian rudal.

Kata Kunci: modernisasi kekuatan militer, diplomasi pertahanan, kebijakan MEF, rudal C-705

Abstract -- In an effort to modernize military power, Indonesia's Government took a *Minimum Essential Force* policy, including joint development and production of C-705 missiles. Hereinafter, joint development and production of C-705 missiles become one of seven strategic defense equipment which is considered in long-term projections to reduce the dependence on imported defense equipment and sanctions for embargoes. Hence, through an act No. 16/2012 regarding the Defense Industry, the procurement process of defense equipment enclosed IDKLO (Trade, Local Content and Offset) for mastering technology and build an independent domestic defense industry. This research

¹ Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

aims to analyze Indonesian defense diplomacy in the process of transferring C-705 missile technology and how the impact of Indonesia's defense diplomacy on cooperation transfer of missile technology C-705. This study uses a qualitative descriptive method through a case study approach with data collection techniques by snowball sampling and literature studies. The results showed that Indonesian defense diplomacy in the process of transferring C-705 missile technology is supporting hedging strategy to hedge up in China's economic political game through MEF with three approaches namely engagement, soft balancing, and enmeshing. Furthermore, defense industry cooperation in efforts to transfer C-705 missile technology affected to Indonesia's bargaining power in conducting defense diplomacy to increase Confidence in Building Measures, Capacity Building, and assist mastering of missile technology in term of upgrading defense industry in missile independence.

Keywords: modernization of military power, defense diplomacy, MEF policy, C-705 missile

Pendahuluan

Sajak berdaulat dan menunjukkan kemerdekaannya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua⁴ di dunia telah mencuri perhatian khusus masyarakat internasional. Mengingat posisi strategis, kondisi geografis yang dimilikinya, beserta peluang dari posisi silang teritori negara. Di samping peluang, tersebarnya hamparan pulau demi pulau yang dikelilingi perairan Indonesia seluas 3.257.483 km² bukan tidak mungkin mengundang tantangan bagi pertahanan-kemananan Indonesia. Terlebih dewasa ini, perkembangan dinamika lingkungan strategis berimplikasi pada pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensi, baik berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman

hibrida yang dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan ancaman belum nyata⁵.

Melalui politik luar negeri bebas aktif serta mengedepankan sikap tidak agresif dan tidak ekspansif menjawab rangkaian bentuk ancaman dalam upaya melindungi kepentingan nasional. Artinya, Indonesia berupaya menyelesaikan permasalahan ancaman yang berkaitan dengan konteks pertahanan-keamanan dan mengedepankan diplomasi yang didukung oleh modernisasi kekuatan militer⁶.

Pemerintah tidak bisa lagi dapat memilih mana yang merupakan prioritas negara antara *gun* dan *butter*, pertahanan atau kesejahteraan. Pertahanan dan kesejahteraan harus berkembang secara bersama dan beriringan guna mencapai apa yang menjadi kepentingan nasional. Mengutip kajian keamanan nasional milik

⁴“The World Factbook of Indonesia” Online; <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>. (diakses pada 20 Agustus 2018).

⁵ Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia, (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), hlm. 1

⁶ Ibid., hlm. 2.

Amerika Serikat yang menjabarkan bagaimana upaya sebuah negara dalam merumuskan sebuah sistem keamanan nasional yang bersifat komprehensif. Komprehensif dalam arti keamanan nasional yakni tentang bagaimana peran pemerintah yang didukung oleh beberapa *instrument* dari kekuatan nasional guna mendapatkan strategi nasional yang objektif. Beberapa *instrument* kekuatan nasional antara lain *Diplomatic, Informational, Military, dan Economic power (DIME)*⁷. Keempat *instrument* ini saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain dalam menciptakan modernisasi kekuatan militer. Sebagaimana yang dipahami negara-negara maju, bahwa dengan memiliki modernisasi militer (*military*) yang kuat maka negara akan memperoleh keuntungan rasa “aman” yang dihasilkan dari efek getar strategis (*informational*) secara regional maupun global.

Idealnya, negara mengalokasikan 2 persen dari produk domestik brutonya untuk kepentingan pertahanan

layaknya yang dilakukan NATO's Rules of Thumbs. Sementara pada tahun 2009, dikutip berdasarkan data yang diperoleh dari World Bank, Indonesia hanya mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 0,05% dari *Gross Domestic Product (GDP)*⁸. Melihat rasio yang diterapkan tersebut, dapat dipahami adanya ikhtiar pemerintah untuk *committed* dalam mendukung konsep pertahanan yang ideal melalui modernisasi kekuatan militer.

Kekuatan Pokok Minimum atau MEF dilahirkan dari amanat pembangunan nasional dalam bidang pertahanan-keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010. Selain itu, pada tahun 2009 dirumuskan *Strategic Defense Review* yang menetapkan pokok-pokok pikiran serta rekomendasi langkah strategis. Beberapa aspek yang menjadi fokus penyelarasan MEF diantaranya personil dan materil, sarana prasarana militer, industri pertahanan, organisasi, serta anggaran⁹. Artinya melalui konsep ini, kemampuan pertahanan negara dilihat

⁷ JG Krenson, “U.S. Army War College Guide to National Security Issues”, *Journal National Security Policy and Strategy*, 5th Ed. Vol.2, 2012, hlm 2-8” (On-line), <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1110>, (diakses pada 20 Agustus 2018).

⁸ Syahrul Aminullah, “*Scenario, Planning dan Strategi Kebijakan Anggaran Penelitian dan Pengembangan Indonesia Tahun 2035*”, (Disertasi, Universitas Indonesia, 2015), hlm. 43.

⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama, poin 1.

berdasarkan kemampuan ekonomi negara.

Berangkat dari beberapa aspek yang menjadi fokus dalam MEF, terlihat industri pertahanan menjadi salah satu aspek yang memainkan peran penting dalam penyalarsan MEF. Jika merunut ke belakang, sebenarnya pemerintah telah merencanakan skenario yang bijak sebagai *integrator* antara kebutuhan ketiga matra personil TNI dengan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. MEF lahir bukan dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan industri pertahanan. Sejatinya, melalui MEF, industri pertahanan dalam negeri dapat menjadikannya batu tumpu pijakan dalam menyusun rencana kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga pengembangan kekuatan yang mungkin dilakukan untuk jangka pendek secara logis yakni pada peningkatan pertahanan guna memberikan efek getar strategis. Sementara pada jangka panjang, pertahanan diarahkan pada perang generasi ketiga. Artinya, negara akan fokus pada industri pertahanan dalam negeri yang mandiri.

Lahirnya KKIP pada tahun 2010, menambah rangkaian bukti bagaimana

pemerintah sangat *committed* untuk mendukung industri pertahanan. Selain itu melalui KKIP, dirumuskan tujuh alat strategis prioritas untuk dikembangkan dalam proyeksi jangka panjang karena dinilai memiliki peran strategis dan signifikan. Hal ini dimaksudkan guna mengurangi ketergantungan pada alutsista impor dan sanksi embargo pengadaan serta suku cadang alutsista. Lebih lanjut, puncaknya berada di tahun 1991-2005, Indonesia mengalami sanksi embargo pengadaan dan suku cadang alutsista dari AS dan sekutunya, akibat dari rangkaian tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di Timor-Timur. Sehingga berkaca dari peristiwa pahit ini, mendorong keinginan pemerintah untuk memiliki kemampuan penguasaan teknologi¹⁰. Berselang dua tahun kemudian dari tangan KKIP beserta sejumlah *stakeholder* terkait, tercetus UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Tiga arahan strategis yang ditunjukkan yakni, sebagai berikut.

Pertama, mewajibkan pengguna dalam negeri menggunakan produksi alutsista dan non-alutsista dalam negeri.. Kedua, manakala harus membeli dari luar negeri, harus diperhatikan apa saja

¹⁰ Silmy Karim, *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan*, (Jakarta: KPG, 2014), hlm.5.

persyaratannya. Beberapa persyaratan yang dikhususkan dalam pembelian industri dari luar negeri diantaranya, transfer teknologi dan *offset* dari negara pemasok kepada industri dalam negeri. Ketiga, pembelian dari luar negeri memiliki jaminan bebas potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan alat peralatan pertahanan dan keamanan¹¹. Dengan demikian, satu kunci didapat yakni pengembangan industri pertahanan dalam negeri tidak terlepas dari suatu skema kerjasama.

Kerjasama menjadi salah satu aspek yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pertahanan suatu negara. Sehingga hal ini mendorong Indonesia melakukan dan mengembangkan kerjasama dalam aspek pertahanan dengan negara lain guna mendukung tercapainya kepentingan nasional bidang pertahanan. Kriteria kerjasama yang dimaksud yakni kerjasama industri pertahanan yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang diarahkan untuk percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan. Selain itu, menekan biaya penelitian dan pengembangan teknologi. Beberapa

aspek yang disentuh dalam kerjasama ini diantaranya bidang pendidikan, pelatihan, alih teknologi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, produksi, pemasaran, serta pembiayaan¹².

Sejarah mencatat, tidak sedikit Indonesia membangun kemitraan dengan beberapa negara strategis. Mengingat politik luar negeri bebas aktif yang dimilikinya. Salah satunya dengan China. China memang bukan mitra asing bagi Indonesia dalam urusan hubungan bilateral. Bahkan beberapa sumber menyatakan hubungan tersebut telah terlahir sejak leluhur kedua negara berinteraksi pada abad sebelum masehi¹³. Meskipun dalam kenyatannya, hubungan bilateral Indonesia-China mengalami dinamika pasang surut akibat perkembangan perubahan lingkungan strategis seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan, serta informasi dan teknologi.

Tepatnya pada 22 Maret 2011 di Jakarta, Indonesia dan China sepakat menandatangani MoU dalam bidang industri pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan State Administration for Science,

¹¹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pasal 24, ayat (1).

¹² Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 47-49.

¹³ Abdul Baqir Zein, "Etnis China Dalam Potret Pembauran di Indonesia", (Jakarta: Prestasi Insan, 2000), hlm. 121.

Techonology and Industry for National Defence (SASTIND) China¹⁴. Bersamaan dengan hal tersebut, Indonesia dan SASTIND China turut menyertakan Letter of Intent (LoI) for development and production cooperation of Anti Ship Sea Defense Weapon System yang diharapkan mampu meningkatkan kerjasama bidang pengadaan alutsista secara khusus maupun kerjasama dalam bidang logistic secara umum.

Sejatinya, penandatanagan LoI ini bukan semata-mata karena Indonesia pertama kali melakukan kerjasama industri pertahanan dengan China dalam hal peluru kendali (rudal). Penggunaan rudal C-802 milik China sejak tahun 2005 menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia (TNI AL) sudah menggunakan rudal buatan China, C-802, yang telah teruji secara teknis, taktis, dan strategis. Pengenalan pertama kali terkait dengan rudal anti kapal C-705 muncul pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008. Lantas ketertarikan tersebut berujung pada kesepakatan dan ketersediaan Pemerintah China menawarkan alih teknologi yang disertakan pembelian untuk rudal C-705. Ketersediaan China

inilah yang menjadi landasan Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama dalam hal industri pertahanan. Mengingat sampai dengan saat ini Indonesia belum berhasil menciptakan rudal anti kapal buatan dalam negeri. dan memproduksi melalui industri pertahanan dalam negeri.

Adanya pemilihan rudal C-705 pada salah satu alutsista strategis Indonesia menggantikan C-802 dikarenakan satu dan/ beberapa faktor lainnya. Beberapa diantaranya yakni bobot hulu ledak rudal yang mencapai 110 Kg HVDT-H high explosive, lebih ringan dibandingkan hulu ledak milik C-802 yakni 165 Kg High Explosive. Dengan bobot hulu ledak yang dimilikinya, yakni 110 Kg, C-705 dipersiapkan untuk menghancurkan kapal perang yang berbobot hingga 1.500 ton dengan daya hancur yang dihasilkannya dapat mencapai hingga 95.7%. Selain itu, sebagaimana dirancang sebagai rudal anti kapal modern, C-705 memiliki kapabilitas *sea skimming*, melalui kapabilitas terbang rendahnya, menjadikannya sulit dideteksi oleh radar. Sehingga spesifikasi inilah yang dipilih pemerintah dan mampu menggantikan posisi rudal C-802 pada TNI AL¹⁵.

¹⁴ “Menhan RI Lakukan Kunjungan ke China”, Online;dmc.kemhan.go.id/post-ri---tiongkok-perkuat-kerjasa 2014- 07-24 15:52:44/(diakses pada 20 Agustus 2018).

¹⁵Indomiliter, “C-705: Rudal Pamungkas Andalan Kapal Cepat TNI AL”, Online; <https://www.indomiliter.com/c-705-rudal->

Menelaah kembali sejumlah rekam data terkait dengan kerjasama industri pertahanan alih teknologi untuk rudal C-705, kedua negara yang dilakukan sejak penandatanganan MoU dan Lol kedua Negara di tahun 2011 bahkan hingga kini, akhir tahun 2018, belum ada ‘titik temu’ kesepakatan alih teknologi dalam pengembangan dan produksi bersama rudal C-705. Hal demikian tentu memberikan sejumlah pertanyaan menarik untuk dikaji lebih jauh terkait dengan bagaimana upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan melakukan strategi *hedging* melalui kebijakan MEF guna mencapai titik temu kesepakatan dalam alih teknologi rudal C-705 dan dampak diplomasi pertahanan Indonesia terhadap kerjasama alih teknologi rudal C-705 yang dilakukan guna meningkatkan leverage Indonesia dalam *bargaining position* di mata dunia. Dengan demikian, peneliti berinisiatif menggunakan judul “Strategi Hedging Dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus: Alih Teknologi Rudal C-705).”

Metode Penelitian

Penelitian tentang Strategi Hedging Dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus: Alih Teknologi Rudal C-705) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Menurut Yin studi kasus adalah suatu inkuiri empiris berguna untuk menyelidiki suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, yang mana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan di mana multitafsir bukti dimanfaatkan di dalamnya¹⁶. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena ingin memahami lebih mendalam suatu permasalahan dimana peneliti dapat mengidentifikasi kasus yang dinilai kaya akan informasi dan mencari makna dari peristiwa yang berkaitan dengan diplomasi pertahanan Indonesia dalam proses alih teknologi rudal C-705 dengan China melalui berbagai bentuk dokumen, peralatan, wawancara, serta observasi.

Dalam pemilihan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* dimana artinya adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya pengambilan data biasa

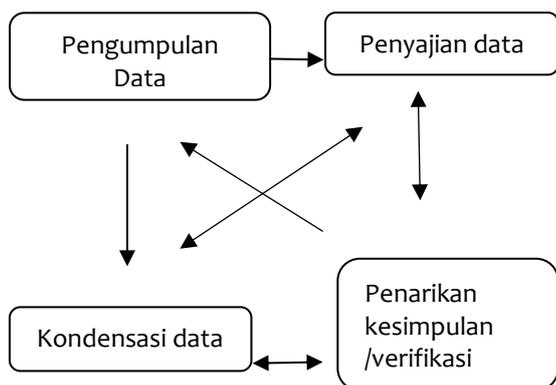
[pamungkas-andalan-kapal-cepat-tni-al/](#)(diakses pada 20 Agustus 2018).

¹⁶ Robert K Yinn, “Studi Kasus Desain & Metode”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 18.

menjadi difokuskan dan mendalam. Para informan telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang terjadi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik dari Miles, Huberman dan Saldana¹⁷ dengan langkah-langkah analisis seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. Analisa Data Model Interactive



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014

Gambar di atas menunjukkan bahwa proses analisis data dilakukan secara bersamaan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, display data yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Langkah terakhir dalam proses analisis data yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Pembahasan

Tujuan dari pembahasan adalah untuk mendapatkan hasil analisa serta gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan karena di dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan membutuhkan lebih banyak penjelasan atau pembahasan serta penguraian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik yang berbeda di lapangan. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk bersikap obyektif terkait permasalahan yang didapatkan dan memberikan pemahaman serta penjelasan kepada pembaca mengenai kejadian faktual dan interpretasi analisis hasil yang didapatkan di lapangan tanpa adanya unsur subyektifitas dari peneliti.

Diplomasi Pertahanan Dalam Proses Kerjasama Industri Pertahanan Dalam Upaya Alih Teknologi Rudal C-705

Berangkat dari kesepakatan kedua negara dalam membentuk Persetujuan Indonesia-China Tentang Aktivitas Bidang Pertahanan. Persetujuan (*Agreement*) ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara di Beijing pada 07 November

¹⁷ Miles, Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Sage, CA, 2014.

2007. Kerjasama pertahanan kedua negara mulai terjalin secara bertahap. Dalam kasus ini, tepatnya pada 22 Maret 2011 di Jakarta, kedua negara menunjukkan ketertarikannya dan mengerucutkannya pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Badan Negara Urusan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Untuk Pertahanan Nasional Republik Rakyat China. Melalui kerjasama industri pertahanan ini, menunjukkan adanya kepentingan Indonesia untuk memperkuat postur pertahanan melalui modernisasi kekuatan militer. Lebih lanjut, modernisasi kekuatan militer diarahkan guna wujudkan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri.

Andrew Cottey dan Anthony Forster dalam bukunya *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, khususnya pada chapter 1 *Strategic Engagement: Defence Diplomacy as a Means of Conflict Prevention* menjelaskan bagaimana *engagement* menjadi alat strategis dengan melibatkan sejumlah dilemma kondisionalitas. Lebih lanjut dijelaskan, diplomasi pertahanan menjadi alat strategis yang mampu

melibatkan pembuat kebijakan dengan kegiatan pertahanan yang transparan. Selain itu, diplomasi pertahanan dipandang menjadi proses yang saling menguntungkan sebagai sarana keterlibatan strategis dengan menawarkan transparansi di sisi lain, sementara sisi lainnya fokus pada bagaimana membangun proses timbal balik yang dilakukannya dengan memperkuat persahabatan¹⁸. Kegiatan pertahanan yang dimaksud dalam konsep *engagement* mencakup upaya menciptakan transparansi dalam relasi pertahanan khususnya terkait dengan intensi dari peningkatan kapabilitas militer, diskusi pada pemangku kebijakan pertahanan dan keterbukaan dalam pembentukan doktrin militer guna menjamin tidak adanya intensi ofensif dari pembangunan kapabilitas kekuatan sebuah negara melainkan sifat defensif¹⁹.

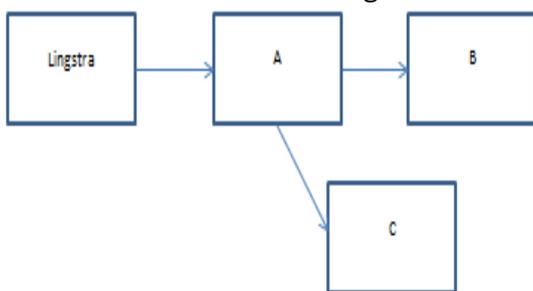
Keputusan Indonesia untuk melakukan kerjasama industri pertahanan dengan China dalam alih teknologi rudal C-705, ditenggarai akan payung hukum diantara kedua negara yakni Deklarasi Kemitraan Strategis yang kemudian kedua negara meningkatkan kemitraannya yang

¹⁸ Andrew Cottey dan Anthony Forster, "Strategic Engagement; Defense Diplomacy as a Means of Conflict Prevention" (Adelphi paper 365: Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for

Military Cooperation and Assistance, 2005), hlm. 18.
¹⁹ Ibid., hlm. 22.

kemudian dikenal dengan *Strategic Comprehensive Partnership* pada tahun 2013. Meski Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara Non Blok namun melalui SCP terlihat adanya *alignment* kedua negara. Setidaknya terdapat empat *alignment*. Tiga hal diantaranya yakni membentuk aliansi, koalisi, dan komunitas keamanan²⁰. SCP di atas bersama sejumlah kemitraan strategis lain yang dibangun Indonesia, dapat menjadi salah satu wahana yang dapat dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman tidakimbang. Kemitraan strategis merupakan wadah diplomasi yang sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan. Lebih lanjut, berikut ilustrasi yang dimisalkan.

Gambar 2. Pola Bargaining Power Terhadap Dua Mitra Strategis



Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan pada gambar diatas, terlihat bahwa kemitraan strategis dapat menjadi alat diplomasi yang efektif dalam mengamankan kepentingan Indonesia,

salah satunya dengan China (*Strategic engagement*). Lebih lanjut, dalam *strategic engagement* terdapat beberapa opsi yang dilakukan negara diantaranya *balancing*, *bandwagoning* dan *hedging*.

Balancing merupakan suatu upaya mengimbangi kekuatan (negara atau aliansi) pesaing melalui pembangunan kekuatan internal atau aliansi (sebagai kekuatan eksternal). Sementara *Bandwagoning* merupakan suatu upaya melalui kekuatan pesaing guna menghindari konflik, baik dalam bentuk memenuhi kepentingan pesaing atau menjadi bagian dalam aliansi pesaing. Berbeda dengan kedua opsi tersebut, sebagai negara yang memiliki politik luar negeri bebas aktif dan bersifat non-blok, hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah bagaimana dapat membangun kekuatan militernya ditengah keadaan yang tidak memungkinkannya untuk beraliansi. Tentu hal ini dapat membatasi ruang gerak untuk membangun kekuatan militer yang membutuhkan sumber daya finansial yang tidak sedikit. Salah satunya yakni Indonesia. Dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia mengambil alokasi anggaran pertahanan selalu dibawah 1% dari nilai PDB. Meski

²⁰ Wilkins, T. S, "Alignment, not Alliance. The Shifting Paradigm of International Security

Cooperation. Sydney: University of Sydney, 2013), hlm. 3.

secara bertahap proyeksi anggaran pertahanan akan meningkat dalam kurun waktu selama sepuluh tahun²¹. Namun, hal tersebut juga bukan merupakan solusi tepat bagi negara non-blok.

Di tengah keadaan demikian disertai dengan dua strategi yang hadir yakni *bargaining* dan *bandwagoning*, dianggap tidak cocok bagi negara non-blok dalam menghadapi ketidakseimbangan kekuatan di sekitarnya, Kuik dalam penelitiannya menambahkan sebuah solusi strategi yakni *hedging*. Kuik mendefinisikan strategi *hedging* merupakan perilaku pengimbangan kekuatan yang dilakukan melalui sejumlah kebijakan guna menghasilkan efek yang diharapkan dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan resiko²². Lebih lanjut, peneliti melihat bahwa strategi *hedging* telah digunakan pemerintah Indonesia dalam proses modernisasi kekuatan militer untuk mendapatkan efek getar strategis di bawah kebijakan MEF. Kebijakan MEF merupakan inisiatif pemerintah yang menguraikan sifat dan

skala kemampuan dalam beragam operasi militer yang diukur dalam tiga komponen utama yang diukur melalui *capacity based planning*, *treat based planning*, dan *flash point*. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang disentuh dalam kebijakan ini, diantaranya diantaranya personil dan materil, sarana prasarana militer, industri pertahanan, organisasi, serta anggaran²³. Dengan begitu, terlihat bahwa modernisasi industri pertahanan menjadi aspek yang memainkan peran penting dalam kebijakan MEF melalui kerjasama industri pertahanan dengan banyak mitra, salah satunya dengan China. Hal demikian relevan dengan penelitian Gindarsah dalam jurnalnya *Strategy Hedging in Indonesia Defense Diplomacy* yang menyampaikan *This way, a military modernization program serves as an “insurance” against the uncertain present and future intentions of great powers. By and large, strategic hedging has permeated the outlook of Indonesia’s multilateral and bilateral defense diplomacy*²⁴. Sejalan dengan hal tersebut, terkait dengan

²¹ Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia. (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), hlm. 126.

²² Kuik C, “The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China”, *Journal of Contemporary Southeast Asia*, Vol. 30 No.2, 2010, hlm 159-185.

²³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 tentang Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama, poin 1.

²⁴ Lis Gindarsah, “Strategic Hedging in Indonesia’s defense diplomacy”, *Journal of Defense & Security Analysis*. Routledge. Nomor. 03, 2016, hlm. 5-6.

kerjasama industri pertahanan dalam alih teknologi rudal C-705, secara umum diplomasi pertahanan secara bilateral telah berperan dalam pengembangan kemampuan pertahanan nasional.

Sejalan dengan Gindarsah, Evelyn Goh menjabarkan lebih jauh terkait dengan strategi *hedging* yang memiliki karakteristik fleksibel melalui perilaku strategi *indirect* atau biasa yang dikenal dengan *soft balancing*. Nilai dari strategi *indirect* atau *soft balancing* adalah melakukan strategi keseimbangan dengan melakukan upaya untuk mengajak negara *great powers* untuk mengimbangi pengaruh dan perkembangan kekuatan negara secara kapabilitas pertahanan mengalami peningkatan militer serta memiliki potensi sebagai ancaman. Strategi ini dilakukan ketika negara tidak menerima dominasi pengaruh dari negara lain, dan lebih memprioritaskan pada proses keseimbangannya dengan mengkombinasikan kekuatan ekonomi, diplomasi dan institusional²⁵.

Kondisi ini sejalan dengan apa yang didapatkan Indonesia dalam proses melakukan kerjasama industri pertahanan dalam upaya alih teknologi rudal C-705,

yang kemudian dihadapkan dengan dampak diplomasi pertahanan Indonesia yang terbagi menjadi tiga karakter diplomasi pertahanan yakni meningkatkan *CBM, Capacity Building dan Defense Industry*.

Selanjutnya, strategi *hedging* juga meliputi strategi *enmeshing*. Strategi *enmeshing* merupakan upaya untuk membentuk sebuah kekuatan berdasarkan kepentingan nasional negara tersebut yang berpangkal pada adanya proses *engagement*²⁶. Adapun tujuan dari strategi ini agar lebih menjamin keadaan pertahanan dan stabilitas kawasan ataupun global termasuk berperan dalam memberikan efek getar strategis. Berangkat dari penelitian Evelyn Goh tersebut, hal ini relevan dengan proyeksi akan kebutuhan rudal guna menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia dan didukung sebagai upaya modernisasi kekuatan militer Indonesia yang kemudian berorientasi pada adanya keinginan Indonesia untuk penguasaan teknologi rudal. Sementara pada realitanya, ketersediaan teknologi rudal yang berada di pasar pertahanan dunia masih dibatasi. Mengingat adanya organisasi MTCR, yang

²⁵ Evelyn Goh, "Meeting the China Challenge: The U.S in Southeast Asian Security Strategies", *Journal of Policy Studies: Monograph No.16*.

Washington DC: East- West Center Washington, Nomor. 4, 2015, hlm. 8.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

mana berperan untuk membatasi penyebaran teknologi dan komponen rudal pada negara dunia ketiga atau negara yang memiliki kepentingan politik yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya rasa khawatir akan kemampuan negara yang nantinya memiliki teknologi rudal balistik yang dapat dimuat nuklir. Berdasarkan penjabaran tersebut, terlihat jelas ketatnya pengawasan alih teknologi akan rudal. Sementara China memberikan sinyal positif melalui penawaran alih teknologi untuk rudal C-705 kepada Indonesia.

Dampak Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Kerjasama Industri Pertahanan Dalam Upaya Alih Teknologi Rudal C-705

Hubungan kerjasama bidang pertahanan Indonesia-China yang makin meningkat sejalan dengan peningkatan status hubungan bilateral kedua negara. Misalnya saja pada bidang pertahanan-keamanan, Indonesia dan China sepakat untuk membentuk Persetujuan Indonesia-China Tentang Aktivitas Bidang Pertahanan. Persetujuan (*Agreement*) ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara di Beijing pada 07 November 2007. Dari pihak Indonesia, ditandatangani

oleh Juwono Sudarsono, selaku Menteri Pertahanan Indonesia periode 2004-2009, dan Menteri Pertahanan China, Cao Gang Chuan²⁷. Kedua negara menunjukkan ketertarikannya dan mengerucutkannya pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Badan Negara Urusan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Untuk Pertahanan Nasional Republik Rakyat China pada 22 Maret 2011, bertempat di Jakarta. Bersamaan dengan disepakatinya Nota Kesepahaman tersebut, Indonesia-China pun turut menandatangani *Letter of Intent for Development and Production Cooperation of Anti Ship Sea Defence Weapon System* Antara Kemhan RI dan SASTIND China.

Rangkaian kesepakatan demi kesepakatan yang dibentuk kedua negara dalam kerjasama industri pertahanan alih teknologi Rudal C-705 membuktikan adanya kegiatan diplomasi kedua negara yang sedang dijalankan sebagai instrumen dalam mencapai kepentingan nasional. Hal ini selaras dengan tabel aktivitas diplomasi pertahanan milik Andrew Cottey dan Anthony Forster. Lebih lanjut, Idli Syawfi membagi aktivitas diplomasi pertahanan tersebut menjadi tiga karakter

²⁷ Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China

Tentang Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan 2007, poin 1-4.

yakni diplomasi pertahanan untuk CBM, *capacity building*, dan *defense industry*²⁸.

Deklarasi Kemiraan Strategis tahun 2005 menjadi payung hukum kedua negara sekaligus menjadi titik awal kerjasama kedua negara perlahan ditingkatkan hingga ke bidang pertahanan. Lebih lanjut, Baviera menambahkan beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan CBM kedua negara dalam melakukan kerjasama. Beberapa indikator yang dimaksud, diantaranya *communication*, *transparency*, *consultation*, *goodwil*, *economic CBM*, *sosio cultural CBM*, dan *political CBM*²⁹.

Pertama, komunikasi. Rangkaian kesepakatan yang tercetus dari hubungan bilateral Indonesia China merupakan bukti terjalannya komunikasi yang baik pada kedua negara. Melalui komunikasi baik yang terjalin dari kedua negara, khususnya untuk bidang pertahanan, pada tanggal 07 November 2007 tercetus Peretujuan Indonesia- China Tentang Aktivitas Bidang Pertahanan.

Kedua, tranparansi. Indikator ini mengarahkan tujuan dari Persetujuan

Indonesia-China Tentang Aktivitas Bidang Pertahanan. Persetujuan ini mengarahkan transparansi Indonesia dan China akan bidang pertahanan-keamanan yang menjadi domain kedua negara untuk mengaplikasikan kerjasama pertahanan yang didasarkan pada *shared value*, *mutual respect*, dan *common interest*. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, transparansi ditunjukkan Indonesia dengan keinginannya melakukan modernisasi kekuatan militer yang didasarkan pada kebijakan MEF.

Ketiga, konsultasi. Konsultasi secara khusus terlihat dengan keterlibatan kedua negara dalam forum dialog bersama, DICM. DICM merupakan forum agenda rutin tahunan yang dilakukan kedua negara sebagai wujud dari kerjasama bidang pertahanan yang dilakukan saat ini sedang berlangsung, serta potensi kerjasama industri pertahanan yang akan berpeluang untuk dilakukan kerjasama lanjutan lainnya.

Keempat, *goodwill* ini mengarahkan pada posisi keterbukaan dari China, ketersediaan China untuk menawarkan alih teknologi Rudal C-705. Mengingat

²⁸ Arifin Multazam, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan" (Tesis, Universitas Indonesia, 2010), hlm. 18.

²⁹ A. S Baviera, *Bilateral Confidence Building With China in Relation to the South Chienese Seas*

Dispute: A Phillipine Perspective, (Canada: Department of Foreign Affairs and International Trade of Canada, 2001), hlm. 4.

penguasaan teknologi Rudal dalam pasar alutsita dibatasi³⁰.

Kelima, *economic CBM*. Indikator ini merupakan indikator yang mengarahkan apakah kerjasama yang dibangun kedua negara juga berguna untuk kemaslahatan bangsa di dalamnya. Berdasarkan analisa kepentingan nasional, kerjasama ini dibentuk karena adanya dorongan kepentingan nasional Indonesia untuk menggerakkan roda industri pertahanan dalam negeri. Sehingga ke depannya diharapkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri sehingga meningkatkan sektor ekonomi formil Indonesia dalam lingkup ekonomi mikro.

Keenam, *socio cultural CBM*. Berangkat dari tujuan awal kerjasama industri pertahanan ini dilakukan, *training* yang akan dilakukan China untuk Indonesia melalui tenaga *engineering* yang secara langsung, dengan demikian akan terbaur kegiatan sosial budaya yang dilakukan.

Ketujuh, *political CBM*. Dalam studi ilmu hubungan internasional, kepentingan nasional adalah segalanya. Indikator *political CBM* dalam penelitian ini tercermin dari kunjungan kedua kepala negara untuk meningkatkan hubungan

mitra strategis dalam berbagai bidang kerjasama termasuk di dalamnya kerjasama industri pertahanan.

Dalam kerjasama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dan China, terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yakni dengan alih teknologi Rudal C-705 guna meningkatkan kapabilitas kemampuan teknologi pertahanan Indonesia, dan peningkatan kapabilitas personil militer TNI AL melalui *training* pengoperasian instalasi dari Rudal C-705.

Proyeksi dalam alih teknologi Rudal C-705 ini selain meningkatkan kapabilitas penguasaan teknologi rudal, adanya arahan dari kerjasama pertahanan kedua negara ini dalam pengembangan dan produksi bersama untuk rudal C-705 dengan tujuan Indonesia mampu untuk mengembangkan dan memproduksi rudal C-705 yang nantinya akan mampu digunakan oleh user, TNI AL, maupun dikembangkan melalui skema riset dan pengembangan menjadi inovasi rudal baru yang disesuaikan dengan kebutuhan user bahkan berpotensi untuk dapat dipasarkan ke negara lain. Lebih lanjut,

³⁰Ninok Leksono, Balistik, Online; <https://www.pressreader.com/indonesia/kompa>

[s/20180203/281736974896489](https://doi.org/10.24127/aj.v1i1.281736974896489), (diakses pada 19 Januari 2019).

merujuk pada Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia yang menuliskan bahwa China merupakan mitra strategis Indonesia dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, kemampuan operasional, profesionalisme sumber daya manusia, dan modernisasi alutista³¹.

Jika ditelaah lebih lanjut, berdasarkan aktivitas diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia-China, mengindikasikan masih belum maksimal diplomasi pertahanan yang dilakukan kedua negara. Mengingat belum terlaksananya kesepakatan *win-win solution* bagi kedua negara untuk melakukan alih teknologi rudal C-705 yang selanjutnya diupayakan dalam pengembangan dan produksi bersama. Meski berdasarkan karakter diplomasi pertahanan dalam CBM dan *capacity building* kerjasama yang dilakukan kedua negara sudah mengindikasikan pada dimensi-dimensi yang mengindikasikan pada kemitraan strategis kedua negara dalam bidang pertahanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah

daerah dalam melakukan pencegahan potensi konflik horizontal di kawasan jalur tambang Kabupaten Bogor, studi kasus di Parung Panjang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Diplomasi pertahanan Indonesia dalam proses kerjasama alih teknologi rudal C-705 mendukung pelaksanaan dari strategi hedging yang terlihat dari perilaku pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan MEF. Lebih lanjut, hedging yang dilakukan Indonesia terhadap China menggunakan tiga bentuk pendekatan yakni strategi *engagement*, *enmeshing* dan *soft balancing*. Berdasarkan tiga bentuk strategi sebagai pendekatan yang dijalankan Indonesia terhadap China, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia menjalankan strategi hedging dalam mendukung diplomasi pertahanan dikarenakan beberapa hal. Kerjasama industri pertahanan yang dilakukan kedua negara merupakan representasi dari pendekatan strategi *engagement* yang didasari oleh payung hukum Deklarasi Kemitraan Strategis – Kemitraan Strategis Komprehensif. Lebih lanjut, strategi ini dilakukan

³¹ Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), hlm. 68.

Indonesia sebagai opsi alternatif ideal dalam merespon kerjasama industri pertahanan alih teknologi rudal C-705. Persepsi Indonesia berangkat dari kepentingan nasional Indonesia melalui UUD 1945 alinea ke-empat tertulis apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, secara singkat dapat dikatakan yakni *sovereignty, security dan prosperity*. Kedaulatan wilayah tentu menjadi urusan utama dalam hal kepentingan nasional yang didukung dengan keamanan melalui kekuatan militer dan akhirnya dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat dalam negara. Dalam penelitian ini, kebutuhan TNI AL akan rudal C-705 teridentifikasi dari beberapa komponen utama kebijakan MEF yakni *capacity based planning, treat based planning, dan flash point*. Selain itu, persepsi lainnya lahir dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menentang melakukan aliansi dengan salah satu kekuatan. Berdasarkan rekam data kerjasama industri pertahanan dalam upaya alih teknologi yang dilakukan kedua negara, strategi hedging dapat dikatakan sebagai sikap yang tenang. Artinya, melalui strategi ini Indonesia berupaya untuk tidak terjebak dalam permainan politik ekonomi China yang berakibat

dari merugi akibat salah memilih dan bertahan pada perjuangan yang lebih prinsipil melalui upaya peran strategisnya di bawah kebijakan MEF.

2. Kerjasama industri pertahanan dalam alih teknologi rudal C-705 berdampak untuk meningkatkan *lverage* Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan. Dalam penelitian ini, dampak diplomasi pertahanan Indonesia menjadi bagian dari strategi hedging yang dilakukan Indonesia dalam perspektif *soft/indirect balancing*. Melalui analisis karakter diplomasi pertahanan, kerjasama industri pertahanan dalam alih teknologi rudal C-705 yang dilakukan Indonesia dan China turut membangun tiga karakter diplomasi pertahanan diantaranya, *confidence building measure* Indonesia sehingga berpengaruh pada terjalinnya hubungan bilateral yang makin intens antar kedua negara melalui rangkaian kegiatan saling kunjung kepala negara dan berpotensi membuka kerjasama pertahanan lainnya. Selain itu, adanya peningkatan kapasitas (*capacity building*) personel militer melalui pelatihan yang diikutsertakan dalam proses upaya alih teknologi rudal C-705. Sehingga hal ini dapat

mengembangkan kapasitas personil, kemampuan menggunakan teknologi rudal terstandar, serta meningkatkan profesionalisme kerja. Meski belum terjalannya alih teknologi rudal C-705 yang memberikan pengaruh pada kurang maksimalnya kerjasama industri pertahanan yang dilakukan kedua negara, namun potensi untuk mencapai kesepakatan alih teknologi rudal C-705 masih mungkin dicapai. Dengan demikian, sikap hedging yang dilakukan Indonesia adalah untuk mendapatkan kedudukan (*positioning*) yang baik dengan semua negara tetapi juga untuk menciptakan *bargaining position* politik sehingga memperoleh dukungan positif secara khusus dalam bidang ekonomi dan militer.

Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah sebagai bahan masukan dalam menjalankan diplomasi pertahanan, seperti:

1. Pemerintah harus menekankan komitmen untuk terus konsisten merealisasikan modernisasi kekuatan militer meski telah berganti pemerintahan. Hal ini berdampak pada

kurang optimalnya roadmap yang telah disusun untuk penguasaan teknologi dari program-program yang direncanakan pemerintah dengan perjanjian yang disepakati.

2. Pemerintah perlu melakukan pembandingan penawaran offset / alih teknologi dari produk alutsista teknologi rudal agar dapat diketahui parameter lainnya dalam proses alih teknologi. Mengingat perihal alih teknologi rudal merupakan hal pertama kali yang dijalankan Indonesia Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap wilayah daerah tambang dan jalur tambang untuk lebih intens. Pengawasan lapangan dilakukan kurang lebih persemester sekali.

3. Pemerintah membutuhkan penelitian lanjutan terkait dengan beberapa pendekatan *engineering* dalam hal alih teknologi. Khususnya, yang menjelaskan benchmarking teknologi dan kalkulasi value teknologi yang dioffset-kan. Sehingga hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi stakeholder pengembangan program alutsista nasional khususnya untuk IDKLO.

4. Pemerintah membutuhkan telaah penelitian lanjutan terkait

penggunaan strategi soft China terhadap Indonesia dalam kerjasama pertahanan yang dilakukan kedua negara. Hal ini didasari sebagai upaya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi China dalam menjalin kerjasama dengan negara *middle power* dan bagaimana China dalam *rising power*nya melunak.

Daftar Pustaka

- Andrew Cottey dan Anthony Forster. 2005. *Strategic Engagement; Defense Diplomacy as a Means of Conflict Prevention*. Adelphi paper 365: Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance.
- Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia. 2015.
- Creswell, John W. 2008. *Educational Research, Planing, Conducting, and Evaluating, Qualitative and Quantittaiive Approach*. London: Sage Publications.
- Deklarasi Kemitraan Strategis Antra Republik Indonesia dan Republik Rakyat China. 2005
- Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S in Southeast Asian Security Strategies*. Policy Studies: Monograph No.16. Washington DC: East- West Center Washington
- Gindarsah, Lis. 2016. *Strategic Hedging in Indonesia's defense diplomacy*. Defense & Security Analysis. Routledge.
- Hans J Morgenthau. 2010. *Politik antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indomiliter. 2011. C-705: Rudal Pamungkas Andalan Kapal Cepat TNI AL. <https://www.indomiliter.com/c-705-rudal-pamungkas-andalan-kapal-cepat-tni-al/>. Diakses pada 20 Agustus 2018
- Karim, Silmy. 2014. *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kuik, C. 2010. *The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China*. Contemporary Southeast Asia Vol. 30 No.2.
- Leksono, Ninok. 2018. *Balistik*. <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180203/281736974896489>. Diakses pada 30 Desember 2018.
- Miles dan Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. SAGE, California.
- Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (ed.22)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- S Baviera. *Bilateral Confidence Building With China in Relation to the South Chienese Seas Dispute: A Phillipine Perspective*. Canada: Department of Foreign Affairs and International Trade.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo.co. *Misil Cina Akan Dipakai TNI AL*. <https://nasional.tempo.co/read/421615/misil-cina-akan-dipakai-tni-al/full&view=ok>. Diakses pada 17 Desember 2018
- The World Factbook of Indonesia. 2018. <https://www.cia.gov/library/publicat>

[ions/the-world-factbook/geos/id.html](#). Diakses pada 20 Agustus 2018

U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Vol 2: National Security Policy and Strategy, 5th Ed." (On-line), <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1110>

Undang-Undang No.18 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Alih Teknologi dan Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Alih Teknologi.